

**DALAI LAMA XIV DI ARENA POLITIK TIBET  
PADA TAHUN 1950-1960**

**JURNAL SKRIPSI**



**Oleh:  
Fitriana Kurnianingrum  
11406241027**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

# **DALAI LAMA XIV DI ARENA POLITIK TIBET PADA TAHUN 1950-1960**

Peneliti 1: Fitriana Kurnianingrum  
Peneliti 2: Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.  
[fitriana.kur@gmail.com](mailto:fitriana.kur@gmail.com)

## **Abstrak**

Tenzin Gyatso atau Dalai Lama XIV merupakan pemimpin Tibet sejak tahun 1950. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kondisi Tibet di bawah pemerintahan Dalai Lama XIV, (2) mengetahui langkah-langkah politik Dalai Lama XIV akibat invasi Tiongkok ke Tibet 1950, serta (3) mengetahui perjalanan politik Dalai Lama XIV ke Dharmasala dan fakto-faktor yang mempengaruhi.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo penelitian sejarah terdiri dari lima tahap yaitu: (1) pemilihan topik, (2) heuristik atau pengumpulan sumber, (3) kritik sumber, (4) interpretasi serta (5) historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tibet merupakan wilayah di kawasan Asia Timur dan dihuni oleh etnis Tibetani yang mayoritas beragama Budha serta dipimpin oleh seorang bergelar Dalai Lama. Teokrasi di Tibet dipimpin oleh Dalai Lama XIV sejak 1950 yang merupakan pemimpin negara sekaligus pemimpin keagamaan. (2) Tahun 1950, Tentara Merah Tiongkok memasuki wilayah Tibet secara paksa dengan misi menyatukan Tibet di bawah kekuasaan Pemerintah RRT. Dalai Lama XIV kemudian mengupayakan jalan diplomasi dengan dunia internasional dan juga dengan Pemerintahan RRT untuk mengatasi permasalahan di Tibet. Diplomasi dengan dunia internasional kurang mendapat respon positif sedangkan diplomasinya dengan pemerintah RRT menghasilkan sebuah kesepakatan baru dengan ditandatanganinya Perjanjian Tujuh Belas Butir oleh pihak RRT dengan pihak Tibet. (3) Pada pelaksanaannya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta muncul kerusuhan besar di Lhasa tahun 1959. Kondisi yang semakin tidak kondusif membuat Dalai Lama XIV melakukan perjalanan politik ke India dan pada tahun 1960 atas persetujuan dari Pemerintah India, Dalai Lama XIV mendirikan pemerintahan sementara di Dharmasala.

**Kata Kunci:** *Dalai Lama XIV, Tibet, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)*

# **DALAI LAMA XIV IN THE POLITICAL ARENA IN TIBET IN 1950-1960**

Researcher 1: Fitriana Kurnianingrum  
Researcher 2: Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.  
[fitriana.kur@gmail.com](mailto:fitriana.kur@gmail.com)

## **Abstract**

*Tenzin Gyatso or Dalai Lama XIV was a leader in Tibet since 1950. This study aimed to investigate: (1) the conditions of Tibet under the government of Dalai Lama XIV, (2) the political steps of Dalai Lama XIV to face Chinese invasion in Tibet in 1950, and (3) the political path of Dalai Lama XIV to Dharmasala and the influential factors.*

*The research method in the study was the historical research method. According to Kuntowijoyo, the historical research method consisted of five steps, i.e.: (1) topic selection, (2) heuristics or source collection, (3) source criticism, (4) interpretation, and (5) historiography.*

*The results of the study were as follows. (1) Tibet is a region in East Asia and is inhabited by the Tibetan ethnic group of which the majority of people are Buddhists and is led by one entitled Dalai Lama. The theocracy in Tibet has been led by Dalai Lama XIV since 1950; he is a government leader as well as a religious leader. (2) In 1950, China's Red Army invaded the region of Tibet by force with a mission to unify Tibet under the control of the government of the People's Republic of China (PRC). Then Dalai Lama XIV took a diplomatic step involving the international world and the government of PRC to deal with the problems in Tibet. The diplomacy involving the international world did not get a positive response while the diplomacy involving the government of PRC resulted in a new agreement, marked by the signing of the Seventeen Point Agreement between PRC and Tibet. (3) In its implementation, there were violations and major*

*disturbances in Lhasa in 1959. The conditions getting less conducive made Dalai Lama XIV take a political trip to India in 1960 on the agreement by the Indian government. Dalai Lama XIV established a temporary government in Dharmasala.*

*Keywords: Dalai Lama XIV, Tibet, People's Republic of China (PRC)*

## **I. Pendahuluan**

Tibet merupakan suatu wilayah di kawasan Asia Timur yang kini termasuk dalam salah satu provinsi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak tahun 1950. Ibukota Tibet terletak di kota Lhasa dengan ketinggian rata-rata 4000 meter di atas permukaan laut. Masyarakat Tibet merupakan masyarakat yang taat beragama sehingga orang-orang Tibet menganggap agama adalah hidupnya. Berdasarkan sistem tradisional yang ada di Tibet, biara Budhis memiliki peran sebagai sumber dalam segi perpolitikan, ekonomi, dan spiritual. Pemerintahan Tibet dijalankan secara Teokrasi Budha dan dipimpin oleh seorang yang bergelar Dalai Lama sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin spiritual di Tibet. Dalai Lama XIV merupakan reinkarnasi dari Dalai Lama sebelumnya yaitu Thubten Gyatso atau Dalai Lama XIII. Penentuan reinkarnasi pendahulunya menggunakan suatu sistem kepercayaan yang unik dalam adat masyarakat Tibet.

Dalai Lama XIV naik menjadi kepala negara di Tibet sejak tahun 1950 dalam usianya yang masih menginjak 15 tahun. Naiknya Dalai Lama XIV di usia yang cukup muda didorong oleh kondisi darurat yang terjadi di Tibet. Hal tersebut disebabkan pada tahun 1950, Pemerintah Tiongkok mengirimkan tentaranya memasuki Tibet untuk menundukkan kembali Tibet sekaligus menjadi akhir dari kemerdekaan Tibet. Tentara Tiongkok yang terus bertambah dan mampu menundukkan wilayah perbatasan dengan cepat memaksa Dalai Lama XIV untuk pindah ke selatan Tibet dengan alasan keamanan. Suhu perpolitikan antara Pemerintah Tibet dengan Pemerintah RRT yang terus memanas membuat Dalai Lama XIV terus berusaha untuk mencapai kesepakatan damai. Tahun 1951, Pemerintah Tiongkok dan Pemerintahan Tibet mencapai sebuah kesepakatan baru sebagai tanda terwujudnya jalan damai yang menjamin otonomi Tibet ketika Tibet bersatu dengan Pemerintahan Tiongkok. Otonomi yang dijanjikan tak pernah terwujud dan mengakibatkan ketegangan yang memuncak pada kerusuhan besar tahun 1959 di Tibet. Kondisi ini membuat Dalai Lama XIV kembali meninggalkan Lhasa dan pergi ke India. Dalai Lama XIV kemudian mendirikan pemerintahan sementara di Dharmasala,

India bersama sekitar 10.000 pengikutnya. Pemerintahan Tibet di bawah Dalai Lama XIV sejak saat itu dijalankan di Dharmasala, India hingga saat ini.

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian. Kajian pustaka berkaitan dengan kajian teori terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Penelitian sejarah dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber atau literatur yang sesuai dengan bahasan yang akan diteliti. Penelitian ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan Dalai Lama XIV di arena politik Tibet. Tibet menjadi daerah perebutan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak tahun 1950 ditandai dengan invasi oleh tentara Tiongkok di perbatasan Tibet.

Buku yang digunakan adalah karangan Jung Chang dan Jon Halliday dengan judul asli *Mao: The Unknown Story* telah diterjemahkan oleh Martha Wijaya dan Widya Kirana berjudul *MAO: Kisah-Kisah yang Tidak Diketahui*. Buku ini diterbitkan tahun 2007 oleh PT. Gramedia yang berisi kebijakan-kebijakan Mao Tse Tung sejak memimpin Partai Komunis di Tiongkok hingga akhir hayatnya. Kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya bersangkutan dengan status Tibet sehingga buku ini digunakan dalam pembahasan mengenai perubahan status Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Peneliti juga menggunakan buku karangan Lowell Thomas Jr. berjudul *The Silent War in Tibet* yang telah diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Djambatan N.V sehingga berjudul *Tibet: Api dalam Sekam* terbitan dari penerbit Djambatan N.V tahun 1961. Buku ini mengkaji tentang kondisi Tibet sebelum terjadinya pergolakan dengan pemerintah RRT hingga puncak pergolakan yang meletus pada tahun 1959 di Lhasa. Pergolakan yang terjadi antara rakyat Tibet dan pasukan RRT terjadi sejak tahun 1950. Hal itu disebabkan pada tahun 1950 Tibet resmi masuk menjadi salah satu provinsi RRT. Buku lain yaitu karangan Anna Louise Strong yang diterjemahkan oleh Oey Hong Lee dengan judul *Kisah Pemberontakan di Tibet (Maret 1959)* yang diterbitkan oleh P.T Lucky tahun 1960.

Buku yang tidak kalah penting dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis langsung oleh Dalai Lama XIV dengan judul asli *Freedom in Exile*. Buku ini telah diterjemahkan sehingga berjudul *Bebas di Pengasingan* yang diterbitkan oleh Kadam Choeling tahun 2011. Dalai Lama XIV menuliskan perjalanan hidupnya sebagai tokoh penting yang dipercaya oleh rakyat Tibet. Hal tersebut dikarenakan Dalai Lama

merupakan tokoh pemimpin negara sekaligus pemimpin religius di Tibet. Pengertian Dalai Lama, Kepercayaan masyarakat Tibet terhadap Dalai Lama XIV, status Dalai Lama serta pembahasan khusus tentang profil Dalai Lama ke XIV dikaji dalam buku ini. Buku berjudul *Bebas di Pengasingan* tersebut digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian sehingga banyak digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ini.

## **B. Metode Penelitian**

Menurut Kuntowijoyo metode penelitian sejarah mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah serta keabsahan sumber), interpretasi secara analisis dan sintesis dan penulisan.<sup>1</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pemilihan Topik**

Pemilihan topik digunakan untuk menentukan permasalahan yang hendak dikaji dalam sebuah penelitian. Topik penelitian sejarah hendaknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>2</sup> Kedekatan emosional dalam pemilihan topik ini sebagai bidang kajian dikarenakan ketertarikan terhadap Dalai Lama XIV sebagai tokoh yang menginspirasi dan mempunyai pandangan yang terbuka terhadap agama. Kedekatan intelektual dalam pemilihan topik ini dikarenakan oleh pergolakan yang terus terjadi di Tibet bahkan hingga sekarang. Tibet yang terus berjuang meraih otonomi penuh dari Pemerintah Tiongkok melalui berbagai jalan sejak tahun 1950. Pergolakan di Tibet memuncak pada pecahnya perlawanan rakyat di Lhasa tahun 1959. Keadaan ini membuat Dalai Lama XIV mengambil keputusan untuk meninggalkan Lhasa pada 17 Maret 1959 dan pergi ke India.<sup>3</sup> Dalai Lama XIV mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan sejak tahun 1960 di Dharmasala, India berkat diplomasinya yang berhasil dengan Pemerintah India. Pemerintahan Dalai Lama XIV di Pengasingan didirikan agar pengupayaan perdamaian di Tibet segera terwujud.

### **2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)**

Heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah untuk menghimpun jejak-jejak masa lampau yang disebut dengan data sejarah.

---

<sup>1</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2005), hlm. 90.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>3</sup> Radis Bastian, *Dalai Lama: Pemikiran Emas Sang Pemercik Kedamaian*. (Yogyakarta: Penerbit PALAPA, 2014), hlm. 134.

Heuristik sendiri berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber sejarah.<sup>4</sup>

Sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari orang yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri.<sup>5</sup> Sumber primer tertulis berupa surat kabar, buku-buku, dan penerbitan lain meski langka namun sangat menentukan.<sup>6</sup> Sumber Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Dalai Lama XIV. (2011). "Freedom in Exile". a.b. Tim Penerjemah Penerbit Kadam Choeling. *Bebas di Pengasingan*. Bandung: Penerbit Kadam Choeling.

Hutheesing (Ed.). (1960). *A White Book Tibet Fight For Freedom*. Bombay: Orient Longmans.

Anonim (Ed.), (1959). *Concerning The Question of Tibet*. Peking: Foreign Languages press.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diberikan oleh orang lain atau sumber lain, di mana seseorang tersebut tidak menyaksikan secara langsung peristiwanya.<sup>7</sup> Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku, surat kabar, serta data dari internet melalui website-website yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kritik Sumber

Kritik sumber diartikan sebagai usaha untuk mencari kebenaran, sejarawan diharapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin, dan apa yang meragukan atau mustahil.<sup>8</sup> Kritik sumber terdiri dari dua bagian meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah

---

<sup>4</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29.

<sup>5</sup> Sardiman A.M, *Mengenal Sejarah*. (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004), hlm. 55-56.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 96.

<sup>7</sup> Sardiman A. M, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>8</sup> Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), hlm. 131.

usaha mendapatkan otentitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber.<sup>9</sup> Kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung dua makna yang berbeda, dikecohkan, dan lain-lain.<sup>10</sup>

#### 4. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran dapat dilakukan melalui proses yang terdiri dari analisis dan sintesis, kedua proses tersebut harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan pada dokumen.<sup>11</sup> Analisis data dilakukan dengan cara mencocokkan sumber kemudian dilanjutkan pada proses sintesis dari data-data yang didapat digabungkan sehingga menghasilkan suatu pendapat yang saling berhubungan dan sesuai dengan fakta yang ada. Tahap interpretasi menuntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan, terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah.<sup>12</sup>

#### 5. Historiografi

Secara umum historiografi atau penulisan sejarah dapat diartikan sebagai penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah. Sehingga hasil penelitiannya dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah dalam kacamata penelitian historis. Historiografi merupakan puncak dari metode penelitian sejarah.<sup>13</sup> Sejarawan mencoba menangkap dan memahami sejarah sebagaimana yang terjadi kemudian menghasilkan suatu karya ilmiah berupa penulisan sejarah.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian untuk mengkaji dan memahami suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, pendekatan merupakan suatu hal yang penting dalam proses penelitian. Pendekatan ini berfungsi untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah agar permasalahan yang diteliti dapat diungkap secara menyeluruh. Menurut W.A Robson ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yang bersifat hakiki, dasar,

---

<sup>9</sup> Suhartono W. Pranoto, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>12</sup> Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 50.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

proses-proses, ruang-lingkup, dan hasil-hasil. Pendekatan politik digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu alat bantu dalam memahami kondisi perpolitikan yang terjadi antara Tibet dan Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah RRT berusaha menggoyahkan kekuasaan Dalai Lama XIV di Tibet dan menjadikan Tibet sebagai bagian dari teritori RRT.

Permasalahan antara Tibet dengan pemerintah Tiongkok yang tidak kunjung usai banyak mendapat perhatian dari dunia internasional. Menurut Rodee dan Anderson, disiplin akademis mengenai hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik yang mencakup bidang-bidang khusus seperti hukum internasional, politik internasional, dan organisasi internasional. Hubungan Internasional mengenalkan teori konstruktivis dalam perpolitikan, menurut Alexander Wendt teori ini mengembangkan studi kasus detail yang mengeksplorasi formasi identitas tertentu antar kelompok akan menolak keanggotaan dari kelompok lain. Studi ilmiah konstruktivis menjadi penting dalam memahami terorisme, konflik etnis, dan kekerasan religius. Teori ini digunakan untuk mengkaji pihak Tibet sebagai salah satu kelompok yang menolak disatukan di bawah Pemerintahan RRT sebagai kelompok lain. Penolakan yang terjadi menimbulkan konflik antar kedua kelompok tersebut. Menurut studi Hubungan Internasional suatu komunitas internasional memiliki potensi untuk menggunakan organisasi internasional, hukum perjanjian internasional, dan diplomasi negara untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Diplomasi dilakukan oleh Dalai Lama XIV dengan negara-negara yang dianggap mempunyai kekuatan untuk mendukung tercapainya perdamaian dengan RRT selain itu diplomasi juga dilakukan dengan Pemerintah RRT sebagai pihak kedua.

Peneliti juga menggunakan teori konflik untuk mengkaji hubungan sosial antar manusia. Teori konflik tersebut salah satunya yaitu menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap status Tibet merupakan salah satu bentuk konflik yang terjadi.

## **II. Pembahasan**

### **A. Tibet di Bawah Pemerintahan Dalai Lama XIV**

#### **1. Kondisi Tibet Secara Geografis**

Tibet atau dalam sebutan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan Provinsi Xizang dikenal sebagai “Negeri Atap Dunia”.<sup>14</sup> Hal tersebut sesuai dengan letak Tibet yang sebagian besar berupa dataran tinggi yang terdapat di daerah Pegunungan Himalaya. Luas wilayah Tibet sekitar 2.500.000 meter<sup>2</sup> yang terletak di kawasan Asia Timur. Ibukota Tibet adalah Lhasa yang terletak di lembah yang dekat dengan Sungai Tsangpo di Tibet bagian selatan dan memiliki ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut.<sup>15</sup> Wilayah Tibet secara keseluruhan dikenal sebagai *Cholka-Sum* yang terdiri dari kawasan U-Tsang, Kham dan Amdo.<sup>16</sup> Bagian Utara Tibet berbatasan dengan daerah otonomi Uygur Xinjiang dan provinsi Qinghai. Bagian Timur berbatasan dengan Yunnan dan provinsi Sichuan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Myanmar, India, Bhutan, dan Nepal serta di bagian barat berbatasan dengan India.<sup>17</sup> Berdasarkan peta letak Tibet berada di wilayah paling Barat dari Tiongkok.

Penduduk asli di Tibet adalah etnis Tibet. Agama asli penduduk Tibet disebut dengan agama Bon<sup>18</sup>, yang kini mayoritas masyarakatnya memeluk agama Budha. Agama Budha menyebar luas ke luar wilayah India pada saat Raja Asoka dan mulai memasuki Tibet sekitar abad ke-7.<sup>19</sup> Tibet mempunyai kehidupan sosial dan adat istiadat yang dipengaruhi kehidupan religius, yaitu agama Budha.<sup>20</sup> Kehidupan religius masyarakat di Tibet banyak memerlukan bantuan dari biksu atau dalam masyarakat Tibet disebut juga dengan Lama untuk memimpin berbagai upacara. Budaya Lamaisme<sup>21</sup>

---

<sup>14</sup> James C.F Wang, *Contemporary Chinese Politics: an Introduction*. (New Jersey: Prentice Hall, England Woodcliffs, 1995), hlm. 165.

<sup>15</sup> Radis Bastian, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>16</sup> *Central Tibetan Administration (CTA), Tibet at a Glance*. Diakses melalui <http://tibet.net> pada Sabtu, 21 Februari 2015 pukul 11.12 WIB.

<sup>17</sup> Radis Bastian, *op.cit.*, hlm. 116-117.

<sup>18</sup> Terdapat lima aliran Budha di Tibet yaitu Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug dan Bon. Bon merupakan agama asli dari wilayah Zhang-zhung. Pada awal abad ke 7, seorang Raja dari Tibet Tengah bernama Kaisar Songtsen Gampo menaklukkan Kerajaan Zhang-zhung dari Tibet Barat dan menciptakan Kekaisaran Tibet bersatu untuk yang pertama. Penaklukan yang dilakukan oleh Kaisar Songtsen Gampo melalui pernikahan dengan putri kerajaan. Putri kerajaan Zhang-zhung yang berhasil dinikahi oleh Kaisar Songtsen Gampo tersebut membawa kebudayaan dan kepercayaan kerajaan yang terdahulu sehingga agama Bon menyebar di Tibet. Lihat tulisan Alexander Berzin. (2000). *Sejarah Lima Aliran Buddha Tibet dan Bon: Sebuah Pengantar*. Diakses melalui <http://www.berzinarchives.com> pada Sabtu, 1 November 2014 pukul 12.38 WIB.

<sup>19</sup> Radis Bastian, *op.cit.*, hlm. 46.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>21</sup> Lamaisme merupakan kepercayaan Budha yang berkembang di Tibet, yang menggabungkan ajaran-ajaran Budha dengan mitologi Tibet (yang bersifat mistis) sebagai bentuk semangat beribadah yang terus dipertahankan keberadaannya sebagai budaya sendiri. L. Austine

juga telah mempengaruhi masyarakat Tibet dalam mempercayakan kepemimpinan di Tibet. Tibet yang menjunjung tinggi ajaran Budha dipimpin oleh seorang bergelar Yang Mulia Dalai Lama.

## **2. Naiknya Dalai Lama XIV**

Dalai Lama merupakan gelar yang diberikan kepada pemimpin spiritual sekaligus pemimpin pemerintahan tertinggi di Tibet. Orang Tibet mempercayai bahwa seorang Dalai Lama merupakan reinkarnasi dari *Avalokitesvara*. Pemilihan Dalai Lama di Tibet mempunyai cara yang unik dengan berbagai ritual kepercayaan Budhisme Tibet. Cara khusus yang dilakukan dalam pemilihan Dalai Lama merupakan tradisi yang menjadi kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Tibet. Prosesi adat dalam ritual tersebut akhirnya menunjukkan hasil dan kemudian terpilihlah seorang anak dari desa Takster bernama Tenzin Gyatso yang lahir pada 6 Juli 1935 sebagai reinkarnasi Dalai Lama XIII.<sup>22</sup>

Gelar Dalai Lama biasanya dinobatkan secara formal sebagai pemimpin Tibet di usia 18 tahun, sedangkan Dalai Lama XIV menerima penobatannya pada usia 15 tahun. Hal tersebut dikarenakan situasi yang mendesak di Tibet dengan adanya invasi tentara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pada 17 November 1950 upacara penobatan digelar di Istana Potala yang menandai Dalai Lama XIV akan menjadi kepala pemerintahan dari sekitar enam juta penduduk Tibet.<sup>23</sup> Penobatan Dalai Lama XIV ini dimaksudkan agar dunia internasional mengetahui Tibet memiliki kepala pemerintahan.

## **3. Sistem Pemerintahan Dalai Lama XIV di Tibet tahun 1950-1959**

Dalai Lama XIV sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai pemimpin spiritual dianggap sebagai pengadilan banding yang tertinggi di Tibet karena Dalai Lama dipercaya sebagai tokoh yang bijaksana. Tugas pertama Dalai Lama XIV setelah resmi dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan Tibet adalah memilih Perdana Menteri baru. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Tibet posisi Perdana Menteri maupun pejabat pemerintah yang lain akan digandakan. Alasan penggandaan dalam pemerintahan ini karena masing-masing akan ditempati oleh seorang sipil dan seorang biksu. Pejabat

---

Waddell, *The Buddhism of Tibet or Lamaism*. (New Delhi: Aryan Books International, 1996), hlm. 17.

<sup>22</sup> Radis Bastian, *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>23</sup> Tim Narasi, *HEROES OF FREEDOM AND HUMANITY: Kisah Para Pahlawan Kebebasan dan Kemanusiaan*. (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2006), hlm. 26.

pemerintahan yang bertanggungjawab membantu Dalai Lama di bidang administratif di sebut dengan Khasag yang terdiri dari empat orang.

Pasca invasi RRT tahun 1951 serta disetujuinya perjanjian damai antara Pemerintahan Tibet dengan Pemerintahan RRT menjadi awal yang baru lagi bagi sistem Pemerintahan Tibet. Pemerintah RRT menunjuk Jenderal Chiang Chin Wu sebagai wakilnya di Tibet. Demonstrasi pada tahun 1952 tentang penentangan rakyat terhadap Jenderal Chiang Chin Wu sebagai perwakilan RRT mengakibatkan dipecatnya Perdana Menteri Tibet oleh pemerintah pusat melalui Dalai Lama XIV. Posisi Perdana Menteri kemudian ditiadakan sejak saat itu dan tugasnya dilimpahkan ke khasag sebagai badan eksekutif.

## **B. Perjuangan Politik Dalai Lama XIV Menghadapi Invasi Tiongkok ke Tibet Tahun 1950**

### **1. Invasi Republik Rakyat Tiongkok ke Tibet tahun 1950**

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri pada tanggal 1 Oktober 1949 dengan pusat pemerintahan di Peking (ibukota Tiongkok saat itu).<sup>24</sup> Mao Tse Tung mencita-citakan Tiongkok menjadi sebuah negara yang kukuh dan makmur di bawah pemerintahannya. Antara tahun 1950-1951, sekitar 20.000 Tentara Merah Tiongkok (PLA) memasuki wilayah Tibet dengan paksa. Awal tahun 1950, barisan terdepan tentara Tiongkok telah sampai di daerah Kantse di sebelah timur Sungai Kingsa. Kekuatan pasukan yang tidak sebanding membuat daerah perbatasan cepat diambil alih pasukan Tiongkok. Bulan Mei 1950, Pemerintah Tiongkok melalui siaran Radio Peking berseru kepada Dalai Lama XIV untuk menyerah kepada “pembebasan damai” atas Tibet.

Pasukan Tiongkok terus bergerak memasuki Tibet dan memusatkan kekuatan tentaranya di wilayah timur, sehingga diputuskan bahwa Dalai Lama XIV pindah ke bagian selatan Tibet. Rombongan dalam perjalanan Dalai Lama XIV kali ini membawa sekitar dua ratus orang, diantaranya adalah para pejabat senior dan pengikut Dalai Lama XIV. Perdana Menteri Tibet yaitu Lobsang Tashi dan Lukhangwa tidak ikut dalam perjalanan ini dan tetap tinggal di Lhasa untuk melaksanakan tugasnya. Rombongan meninggalkan Lhasa pada malam hari dan atas saran dari Kepala Rumah Tangga Istana

---

<sup>24</sup> Roy Medvedev, *China and the Superpowers*. (New York: Basil Blackwell, 1986), hlm. 21.

Dalai Lama XIV harus menyamar dalam perjalanan ini sebagai biksu biasa untuk alasan keamanan.

## **2. Upaya diplomasi Dalai Lama XIV akibat invasi Tiongkok ke Tibet tahun 1950**

### **a. Diplomasi dengan Dunia Internasional**

Dalai Lama XIV kemudian menunjuk beberapa delegasi Tibet untuk dikirim ke Nepal, India, Inggris, dan Amerika Serikat yang dianggap mempunyai hubungan baik dengan Tibet.<sup>25</sup> Pemerintah Tibet menyadari kekuatan militer Tiongkok begitu kuat dan tidak sepadan dengan kekuatan mereka membuat pemerintah mengutamakan upaya diplomasi. Alasan lain adalah Dalai Lama XIV tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Buddhis yang kental di Tibet. Negara-negara tersebut tidak memberikan respon yang positif dengan menyusulnya pernyataan dari pemerintah Tiongkok yang menentang keras para delegasi Tibet dengan menyatakan bahwa para delegasi tersebut adalah ilegal. Pernyataan lain adalah ancaman bagi negara-negara yang menerima delegasi tersebut berarti negara tersebut secara langsung menyatakan bermusuhan dengan Tiongkok.<sup>26</sup>

### **b. Diplomasi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok**

Dalai Lama XIV kemudian mengutus Ngabo Ngawang Jingme seorang Gubernur Chamdo dengan didampingi empat pejabat lain berangkat ke Peking untuk membuka dialog dengan RRT. Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Mao Tse Tung menyambut delegasi dari Tibet seperlunya kemudian mengadakan perundingan dengan segera. Pada 23 Mei 1951, sebuah perjanjian antara Pemerintah Pusat RRT dengan Pemerintah lokal Tibet sebagai tindakan untuk pembebasan damai di Tibet ditandatangani di Beijing oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut disebut dengan Tujuh Belas Butir Perjanjian, isi pokok perjanjian tersebut antara lain adalah bersedianya Tibet kembali kepangkuan Tanah Air (Republik Rakyat Tiongkok) dan bersatu mengusir kekuatan imperialis dari tanah Tibet. Pemerintah Tiongkok akan melaksanakan reformasi di Tibet dan tetap mempertahankan status, fungsi, dan kekuasaan tradisional

---

<sup>25</sup> Dalai Lama XIV, "Freedom in Exile", a.b. Tim Penerjemah Penerbit Kadam Choeling, *Bebas di Pengasingan*. (Bandung: Kadam Choeling, 2011), hlm. 70.

<sup>26</sup> Lowell Thomas Jr., "The Silent War in Tibet" a.b. Tim Penerjemah Djembatan N.V, *Tibet: Api dalam Sekam*. (Jakarta: Penerbit Djembatan N.V, 1961), hlm. 77.

di bawah Dalai Lama.<sup>27</sup> Kemudian Pemerintah Tiongkok menunjuk Jenderal Chiang Chin Wu sebagai Gubernur Jenderal di Tibet.

### **C. Perjalanan Politik Dalai Lama XIV ke Dharmasala dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi**

#### **1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan Dalai Lama XIV ke Daharmasala tahun 1959**

##### **a. Pelanggaran-pelanggaran dalam Perjanjian Tujuh Belas Butir**

Pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi salah satu kendala bagi perjuangan Dalai Lama XIV dalam menghadapi pemerintahan Tiongkok di Tibet maupun sebaliknya yaitu pemerintah Tiongkok di Tibet. Terdapat sumber yang dirilis oleh Komisi Hukum Internasional menyebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Tiongkok maupun pihak Tibet yang berhubungan dengan Tujuh Belas Butir Perjanjian. Permasalahan yang kemudian menjadi salah satu penyulut ketidakpuasan rakyat Tibet atas pendudukan Tiongkok adalah pengerahan rakyat Tibet sebagai pekerja paksa dalam pembangunan jalan tersebut. Hampir seribu rakyat Tibet dikirim untuk bekerja di proyek pembangunan jalan raya, awalnya mereka dijanjikan akan bekerja dengan upah tiga dolar Tiongkok namun pada kenyataannya Tiongkok hanya membayar setengahnya.<sup>28</sup> Mereka dipaksa mengangkat beban yang berat dan bekerja tanpa beristirahat.

Kekejaman yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap rakyat Tibet menyulut beberapa pihak dari rakyat Tibet untuk melakukan perlawanan. Hal ini yang membuat pihak Tibet melanggar poin dari Perjanjian Tujuh Belas Butir. Perayaan *Monlam* tahun 1955 digunakan oleh sebagian orang Amdo dan Kham mengkoordinir sebuah gerakan perlawanan gerilya.<sup>29</sup> Mereka menyebutnya sebagai kelompok *Chushi Gangdruk*<sup>30</sup> yang berarti “Empat Sungai, Enam Gunung” dengan slogan perlindungan agama dan

---

<sup>27</sup> Nurani Soyomukti, *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*. (Yogyakarta: Penerbit Garasi, 2008), hlm. 47-48.

<sup>28</sup> Legal Inquiry Committee on Tibet, *Tibet and the Chinese People's Republic: A Report to the International Commission of Jurists*. (Geneva: International Commission of Jurists, 1960), hlm. 207.

<sup>29</sup> Dalai Lama XIV, *op.cit.*, hlm. 130.

<sup>30</sup> Tindakan Tentara Merah Tiongkok secara represif tidak serta merta mematahkan perlawanan rakyat Tibet. Beberapa saudagar Tibet yang dipimpin oleh Gampo Tashi Andrugtsang mendirikan kelompok yang bernama *Chushi Gangdruk*. Kelompok ini beberapa kali dalam serangan berhasil menggempur psaukan lawan yang mengakibatkan korban berjatuhan di pihak Tiongkok. Radis Bastian, *op. cit.*, hlm. 150.

pemujaan nasionalisme Tibet. Gerakan perlawanan gerilya ini kemudian menyebar luas ke beberapa wilayah di Tibet.

#### **b. Meletusnya Pemberontakan 1959 di Lhasa**

Kerusuhan besar terjadi di Lhasa tahun 1959, terdapat beberapa versi tentang permasalahan antara Tibet dan Tiongkok ini, pihak yang berseteru mempunyai pembenarannya masing-masing. Versi satu menyebutkan bahwa pemberontakan yang meletus pada 1959 di Tibet di dalangi oleh menteri-menteri serta tokoh-tokoh utama agama yang tidak setuju akan penghapusan sistem perbudakan di Tibet.<sup>31</sup> Versi lainnya mengatakan bahwa pemberontakan rakyat Tibet 1959 merupakan reaksi yang terkumpul dan memuncak dalam penolakan atas invasi Tiongkok di Tibet. Penindasan dan kekejaman yang dilakukan orang-orang Tiongkok terhadap rakyat Tibet menimbulkan keberanian mereka untuk melawan dan melepaskan diri dari kendali Tiongkok.

Puncak kerusuhan di Tibet terjadi bulan Maret 1959 ketika ada isu bahwa Tiongkok berencana menculik Dalai Lama XIV. Kejadiannya berawal dari undangan secara pribadi yang diterima oleh Dalai Lama XIV untuk menghadiri pertunjukan teater di Markas Besar Daerah Komando Militer Tibet. Dalai Lama XIV menerima undangan tersebut dengan mempertimbangkan hubungan diplomasi dengan Tiongkok. Pada 10 Maret 1959, ribuan orang berkumpul di depan istana dan diseluruh Lhasa dan berdemonstrasi. Kerusuhan yang terus meningkat di Lhasa dan desakan dari orang-orang disekeliling Dalai Lama XIV, akhirnya tanggal 17 Maret pada malam hari Dalai Lama XIV bergerak meninggalkan Lhasa dengan membawa rombongan dalam penyamaran. Perjalanan tersebut menuju ke selatan mendekati wilayah perbatasan antara Tibet dengan India. Kepergian Dalai Lama XIV yang tidak diketahui publik ini menimbulkan aksi saing tuduh seperti yang dikabarkan oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat bahwa pihak pejuang rakyat menuduh Dalai Lama XIV telah disembunyikan oleh Tiongkok sedangkan RRT menuduh Dalai Lama XIV telah diculik oleh para pejuang rakyat.<sup>32</sup> Ketegangan semakin meningkat dan kerusuhan di Lhasa tidak bisa dibendung

---

<sup>31</sup> Anna Louise Strong, "Tibetan Interviews", a.b. Oey Hong Lee, *Kisah Pemberontakan di Tibet: Maret 1959*. (Jakarta: P.T Lucky, 1960), hlm. 20.

<sup>32</sup> Anonim, "13.000 Pendeta Tibet Ditangkap RRT: Dalai Lama Belum Terang Berada Dimana", *Kedaulatan Rakyat*, edisi Selasa Kliwon, 31 Maret 1959.

lagi. Mao Tse Tung pada tanggal 20 Maret 1959 memerintahkan pasukan militernya untuk menumpas pemberontakan di Lhasa.

## **2. Perjalanan Dalai Lama XIV ke Dharmasala**

Tanggal 29 Maret 1959, Dalai Lama XIV mengirim dua utusan ke perbatasan India-Tibet dan bertemu dengan Pemerintah India untuk meminta izin akan memasuki wilayah India dan meminta suaka politik dari pemerintah. Pemerintah India dengan segala pertimbangan akhirnya memberikan izin untuk Dalai Lama XIV beserta rombongannya melintasi perbatasan dengan alasan kemanusiaan bukan karena alasan politik. Pada 31 Maret 1959, Dalai Lama XIV yang memutuskan untuk pergi bersama pengikutnya dari Tibet menuju Dharmasala, wilayah perbukitan di India bagian utara.<sup>33</sup>

Pemerintah India memberikan tawaran tanah di Dharmasala sebagai tempat tinggal tetap sehingga pada tanggal 29 April 1960, Dalai Lama XIV bersama dengan rombongannya memulai perjalanan ke Dharmasala. Jumlah pengungsi saat itu terus bertambah hingga lebih dari limaribu orang. Dharmasala yang digunakan sebagai tempat tinggal tetap oleh Dalai Lama XIV mulai berbenah dan Dalai Lama XIV disibukan dengan urusan administrasi Tibet karena memutuskan untuk mendirikan pemerintahan sementara di Dharmasala.

## **III. Kesimpulan**

Dalai Lama merupakan reinkarnasi Avalokitesvara atau Bodhisatwa Welas Asih. Tahun 1950, Tenzin Gyatso yang saat itu masih berusia 15 tahun secara resmi dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin spiritual di Tibet dengan gelar Dalai Lama XIV. Penobatannya di usia muda terkesan buru-buru karena pada tahun tersebut Tentara Merah Tiongkok menginvasi Tibet. Jalan damai Dalai Lama XIV melalui diplomasi dilakukan dengan beberapa negara sahabat seperti: India, Nepal, Inggris juga Amerika Serikat. Upaya tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik karena pada umumnya negara-negara tersebut mempertimbangkan status Tibet. Tahun 1951, tercapai suatu kesepakatan damai antara Pemerintah Tibet dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam Tujuh Belas Butir Perjanjian.

Pada kenyataannya banyak keluhan tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan orang-orang Tiongkok hingga propaganda Tiongkok yang mengekang kehidupan beragama rakyat Tibet. Kerusuhan terjadi di penjuru Tibet dengan

---

<sup>33</sup> James C.F Wang, *op.cit.*, hlm. 167.

perlawanan seadanya rakyat Tibet. Gerakan perlawanan yang terorganisir kemudian muncul dengan sebutan Chushi Gangdruk. Gerakan militan ini merekrut orang-orang Tibet untuk berani melawan dan mengusir pendudukan Tiongkok dari tanah Tibet. Gerakan ini mendapat perhatian dari Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat yang kemudian menyuplai senjata dan melakukan pelatihan singkat terhadap para militan Tibet ini. Kerusuhan besar terjadi tahun 1959, setelah terdengar isu bahwa pemerintah Tiongkok akan menculik Dalai Lama XIV. Kerusuhan di Tibet semakin mengancam keselamatan Dalai Lama XIV sehingga 17 Maret 1959, Dalai Lama XIV dengan berat hati meninggalkan Tibet menuju Nanchang. Alasan kemanusiaan dan simpatiya terhadap permasalahan yang dihadapi Tibet kemudian membuat Pemerintah India menyiapkan tempat untuk Dalai Lama XIV beserta rakyatnya yang telah mengungsi untuk tinggal di Dharmasala. Tahun 1960, menjadi babak baru dalam pemerintahan Dalai Lama XIV yang mendirikan pemerintahan Tibet di pengasingan hingga sekarang.

## Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Anna Louise Strong. (1960). "Tibetan Interviews". a.b. Oey Hong Lee. *Kisah Pemberontakan di Tibet (Maret 1959)*. Jakarta: P.T Lucky.
- Dalai Lama XIV. (2011). "Freedom in Exile". a.b. Tim Penerjemah Penerbit Kadam Choeling. *Bebas di Pengasingan*. Bandung: Kadam Choeling.
- Helius Syamsudin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- James C.F Wang. (1995). *Contemporary Chinese Politics: an Introduction*. (New Jersey: Prentice Hall, England Woodclifs.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Legal Inquiry Committee on Tibet. (1960). *Tibet and the Chinese People's Republic: A Report to the International Commission of Jurists*. Geneva: International Commission of Jurists.
- L. Austine Waddell. (1996) *The Buddhism of Tibet or Lamaism*. New Delhi: Aryan Books International.
- Lowell Thomas Jr.. (1961). "The Silent War in Tibet". a.b. Tim Penerjemah Djambatan N.V. *Tibet: Api dalam Sekam*. Jakarta: Penerbit Djambatan N.V.
- Nurani Soyomukti. (2008). *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*. Yogyakarta: Penerbit Garasi.
- Radis Bastian. (2014). *Dalai Lama: Pemikiran Emas Sang Pemercik Kedamaian*. Yogyakarta: Penerbit PALAPA.
- Roy Medvedev. (1986). *China and the Superpowers*. New York: Basil Blackwell.
- Ivan Taniputera. (2008). *History Of China*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Sardiman A.M. (2004). *Mengenal Sejarah*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Narasi. (2006). *HEROES OF FREEDOM AND HUMANITY: Kisah Para Pahlawan Kebebasan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Anonim, "13.000 Pendeta Tibet Ditangkap RRT: Dalai Lama Belum Terang Dimana Berada", *Kedaulatan Rakyat*, edisi Selasa Kliwon, 31 Maret 1959.
- Alexander Berzin. (2000). *Sejarah Lima Aliran Buddha Tibet dan Bon: Sebuah Pengantar*. Diakses melalui <http://www.berzinarchives.com> pada Sabtu, 1 November 2014 pukul 12.38 WIB.
- Central Tibetan Administration (CTA), Tibet at a Glance*. Diakses melalui <http://tibet.net> pada Sabtu, 21 Februari 2015 pukul 11.12 WIB.

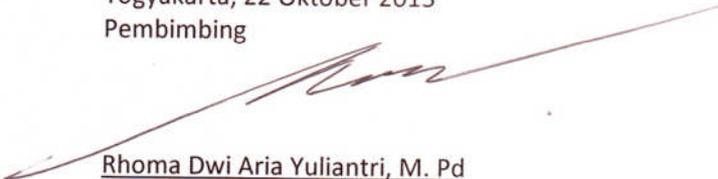
Mengetahui,

Yogyakarta, 22 Oktober 2015  
Pembimbing

Reviewer



Mudji Hartono, M.Hum  
NIP. 19550115 198403 1 001



Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd  
NIP. 19820704 201012 2 004